

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ashari Razak. 2013. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Makassar: Hukum Pelayanan Publik. Makassar :Arus Timur:
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2004. *Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Kinerja Instansi Pemerintah*
- Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara*. Jakarta. Kencana.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta. Bina Ilmu.
- Hardiyansyah. 2015. *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Hamengkubuno X, 2007, *Merajut Kembali ke Indonesia Kita*, Gramedia Jakarta : Pustaka Utama
- Prajudi Atmosudirjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Teori Kewenangan*, Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Ridwan HR. Cetakan 14. 2018. *Hukum Administrasi Negara* Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Lansung*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Subagyo dkk. 2009. *Anotasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Edisi Pertama. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
- Sadjino. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: LaksBang.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi Pertama. Rajawali Pers. Jakarta.

Sedarmayanti, 2004, Pengembangan Keperibadian Pegawai, Bandung: Mandar Maju

Utomo, W. 2006. Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### **Internet**

Krisna Lalolo. 2003. Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, (Jakarta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003). <https://docplayer.info/125452-Indikator-alat-ukur-prinsip-akuntabilitas-transparansi-partisipasi-disusun-oleh-dra-loina-lalolo-krina-p.html> Diakses pada 3 Februari 2021 Pukul 23:50.

Renstra Perubahan Tahun 2016-2021 DisKominfo Kabupaten Barru <https://barrukab.go.id/dinas/> Diakses pada 7 Februari 2021, Pukul 10:15

Wasisto Raharjo Jati. 2012. Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia, Jurnal Konstitusi <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/152>. Diakses pada 1 Maret 2021. Pukul 14.54

### **Hasil Penelitian**

Idrus A. Paturusi, et.al 2019. Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasil Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin Makassar.

### **Jurnal**

Arifin Tahir, 2012, Proses Implementasi Kebijakan Transparansi Manajemen Pemerintahan Kota Gorontalo, Jurnal Aplikasi Manajemen.

Endang Retnowati, 2012. Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)

Sarce Allo Padang Abdul Razak dan Marthen Arie, 2011. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Untuk meningkatkan kinerja pegawai

### **Kamus**

Henry Campbell Black. 1990. Black'S Law Dictionary. United States: West Publishing.

John M. Echols dan Hassan Shadilly. 1997. Kamus Indonesia Inggris Jakarta: Gramedia.

Kamus Philipus M. Hadjon. 1997. Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-des, 1997, hal 1.  
<https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5769/3691> Diakses pada 10 Februari 2021, Pukul 14:32

### **Peraturan PerUndang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2019 Kabupaten Barru Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah.

Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru

# LAMPIRAN



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL,**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410  
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : [barrudpmtsptk@gmail.com](mailto:barrudpmtsptk@gmail.com) .Kode Pos 90711

Barru, 08 Juni 2021

Nomor : 247/IP/DPMPTSPTK/VI/2021  
Lampiran :  
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan  
Statistik Kab. Barru  
di-  
Tempat

Berdasarkan Surat dari KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM Nomor : 4475/UN4.5.3/PT.00/2021 tanggal 04 Juni 2021 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

**Nama** : HADI SHAFITRA JAMAL  
**Nomor Pokok** : B021 17 1307  
**Program Studi** : Hukum Administrasi Negara  
**Pekerjaan** : Mahasiswa (SI)  
**Alamat** : Awerange Desa Batu Pute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **08 Juni 2021 s/d 14 Juni 2021**, d dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**PELAKSANAAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BARRU DI BIDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KE  
MASYARAKAT**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara(i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,  
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan  
Perizinan,



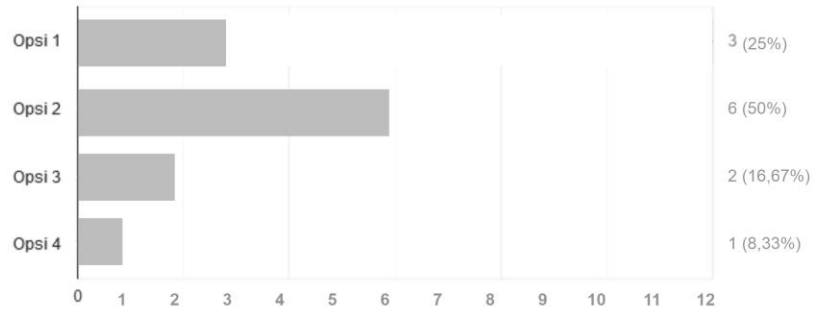
**FATMAWATI LEBU, SE**  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP. 19720910 199803 2 008

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bapedda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Hukum Unhas Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

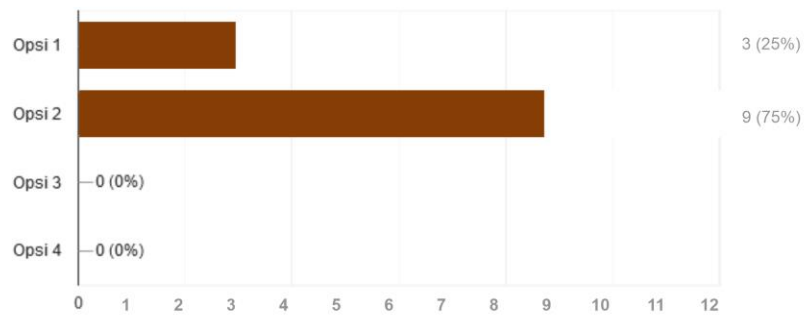
1. Menurut Bapak / Ibu apakah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru harus menyampaikan informasi secara berkala melalui media

12 jawaban



2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai penanganan pengaduan pada unit pelayanan Informasi Publik di PPID Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru

12 jawaban



3. Menurut penilaian Bapak /Ibu akses internet ditempat tinggal anda bisa diakses dengan cepat

12 jawaban

